

# Implementasi Kebijakan Perlindungan Hutan Pada Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo

Nurperdani Kurnia<sup>1</sup>, Mayarni<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Administrasi Publik, Universitas Riau

e-mail: [nurperdani.kurnia5176@student.unri.ac.id](mailto:nurperdani.kurnia5176@student.unri.ac.id)<sup>1</sup>, [mayarni@lecturer.unri.ac.id](mailto:mayarni@lecturer.unri.ac.id)<sup>2</sup>

## Abstrak

Implementasi Kebijakan Perlindungan Hutan pada Hutan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo memiliki beberapa fenomena seperti banyaknya perambahan yang terjadi dan kebakaran hutan secara besar-besaran. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan di dalam dan di luar Kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Perlindungan Hutan pada Hutan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo, Selain itu, juga untuk mengidentifikasi faktor penghambat Implementasi Kebijakan Perlindungan Hutan pada Hutan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut Edward III. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Perlindungan Hutan Pada Hutan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo belum terlaksana dengan baik karena masih banyaknya kekurangan dari beberapa faktor. Faktor penghambatnya ialah anggaran yang kurang memadai, sarana prasarana yang kurang memadai, dan kurangnya komunikasi.

**Kata Kunci :** *Implementasi, Perlindungan, Hutan Konservasi*

## Abstract

The implementation of the Forest Protection Policy in the Conservation Forest of Tesso Nilo National Park has several phenomena, such as extensive encroachment and large-scale forest fires. This policy aims to prevent and limit forest damage both within and outside the Tesso Nilo National Park forest area. The purpose of this research is to analyze and describe the implementation of forest protection policies in the conservation forests of Tesso Nilo National Park. Additionally, it aims to identify the inhibiting factors in the implementation of forest protection policies in the conservation forests of Tesso Nilo National Park using Edward III's policy implementation theory. This research uses a qualitative type of study that is descriptive in nature, collecting data through interviews, observations, and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the Forest Protection Policy in the Conservation Forest of Tesso Nilo National Park has not been carried out effectively due to several shortcomings in various factors. The inhibiting factors are inadequate budget, insufficient infrastructure, and lack of communication.

**Keywords:** *Implementation, Protection, Conservation Forest*

## PENDAHULUAN

Kawasan hutan merupakan wilayah tertentu berupa hutan, yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hal itu untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk menjadi kawasan hutan tetap. Kawasan hutan Indonesia ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi.

Implementasi kebijakan perlindungan hutan pada hutan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo, Balai Taman Nasional Tesso Nillo. Sebagai lembaga yang mengelola Taman Nasional Tesso

Nilo memainkan perannya sebagai penggerak dalam pengelolaan Taman Nasional dan pengembangan potensi wisata alam berbasis lingkungan. Hal ini sejalan dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu, Balai Taman Nasional Tesso Nilo melaksanakan tugas pokok untuk melaksanakan pengelolaan ekosistem kawasan Taman Nasional dalam rangka konservasi sumberdaya alam hayati beserta ekosistemnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konservasi sumber daya alam merupakan suatu pengelolaan yang sangat penting dalam pemanfaatan yang harus dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaan tanpa melupakan pemeliharaan dan peningkatan kualitas keanekaragaman dan nilai-nilainya. Maslihatan & Fauzi dalam Syariful Anam et al., (2021) mengartikan konversi sebagai upaya menjaga kelestarian alam demi kelangsungan umat hidup umat manusia. Sedangkan menurut Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo adalah salah satu perwakilan ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah yang memiliki potensi jasa lingkungan seperti air, udara bersih dan penyimpan karbon. Sementara itu potensi wisata ada berupa sungai, panorama alam, potensi hayati (wisata pengamatan satwa) dan wisata budaya masyarakat lokal. Taman Nasional Tesso Nilo daya tarik utama wisata alam Taman Nasional Tesso Nilo adalah 10 ekor gajah sumatera jinak di *Camp Flying Squad* Taman Nasional Tesso Nilo dengan aktivitas berupa atraksi gajah, safari gajah, mitigasi konflik, patroli gajah, dan pendidikan konservasi. Wisata alam di Taman Nasional Tesso Nilo mengutamakan pengalaman berwisata alam dengan nuansa pendidikan konservasi. Kegiatan wisata alam yang dapat dilakukan di Taman Nasional Tesso Nilo antara lain: menjadi perawat gajah (*Mahout Wanna Be* - dengan melakukan aktivitas memandikan, memberi makan, dan mengamati perilaku gajah) pengamatan tumbuhan dan satwa liar pada jalur wisata yang tersedia berkemah bersama rekan/teman/keluarga dengan menyalakan api unggun; Bersepeda (*Jungle Cycling*) di alam liar/hutan.

Aktivitas perambahan di Taman Nasional Tesso Nilo lebih banyak disebabkan karena faktor ekonomi. Masuknya pendatang, mudahnya oknum pimpinan adat dan institusi lokal untuk menghibahkan dan memperjualbelikan lahan juga semakin mempercepat lajunya perambahan tersebut. Hal ini juga mengakibatkan dibukanya pemukiman-pemukiman baru di sekitar taman nasional Tesso Nilo terutama di sekitar Bukit Kesuma, Toro, dan Bukit Horas. Kondisi aksesibilitas menuju taman nasional Tesso Nilo yang cukup mudah dijangkau dengan adanya jalan koridor konsesi Hutan Tanaman Industri dan perkebunan sawit, mempermudah akses bagi perambah untuk menjangkau dan memasuki wilayah taman nasional Tesso Nilo. Monitoring terhadap kawasan perambahan di taman nasional Tesso Nilo menunjukkan perambahan ini sebagian besar dilakukan pemodal. Mereka berasal dari kota-kota besar di Riau. Sebagai akibat ancaman di atas, maka ekosistem Tesso Nilo mengalami deforestasi dan degradasi. Selanjutnya akan juga berdampak hilangnya nilai penting perlindungan sistem kehidupan, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.

Tingginya tingkat permasalahan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo turut menjadi perhatian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dijelaskan di dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor: SK.267/Menlhk/Setjen/HPL.4/3/2016 (sebagaimana telah diubah melalui SK.376/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2016) tentang Revitalisasi taman nasional tesso nilo dengan pendekatan berbasis masyarakat), bahwa kompleksitas permasalahan taman nasional tesso nilo sarat dengan masalah-masalah kemasyarakatan, kemiskinan, serta rendahnya produktivitas yang perlu segera dilakukan penanganan. Dalam rangka percepatan penanganan permasalahan di Taman Nasional Tesso Nilo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan nomor: SK.72/Menlhk/Setjen/HPL.0/2/2018 yang dirubah dengan SK.1172/MENLHK/SETJEN/HPL.1/11/2022 tentang Percepatan Implementasi Pengelolaan Ekosistem Tesso Nilo Dengan Pendekatan Berbasis Masyarakat Sampai pada akhir tahun 2023.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan 54 taman nasional se-Indonesia termasuk Taman Nasional Tesso Nilo yang terletak dalam wilayah administratif Kabupaten Pelalawan dan

Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 dengan luas 81.793 hektar. Kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo ini sebelumnya ditetapkan merupakan kawasan konsesi hak pengelolaan hutan (HPH) yang sekarang lebih dikenal dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH) yang dikelola oleh PT. Dwi Marta dan PT. Nanjak Makmur. Dampak dari kebijakan pemanfaatan hutan sebelumnya, yang berkaitan dengan penetapan kawasan hutan Tesso Nilo sebagai kawasan hutan produksi terbatas, aktivitas perambahan hutan dalam kawasan ini menjadi sulit dikendalikan.

Kebijakan sebelumnya berkaitan dengan penetapan Taman Nasional Tesso Nilo sebagai kawasan hutan produksi terbatas, maka tidak heran apabila aktivitas sosial perambahan hutan di taman nasional menjadi tinggi. Ini sangat disayangkan mengingat kawasan yang seharusnya menjadi hutan lindung bagi satwa langka, tidak luput dari kegiatan perambahan dan diubah menjadi perkebunan dan permukiman. Pembukaan lahan hutan akan mengakibatkan rusaknya fungsi hutan dan mengakibatkan musnahnya berbagai jenis flora dan fauna. Lahan hutan yang dirambah ini dialih fungsikan menjadi lahan sawit ilegal. Bahkan PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) mempunyai jalan (koridor) yang diduga menjadi bagian yang turut berkontribusi besar pada permasalahan perambahan taman nasional.

Koridor tersebut berada di Kabupaten Pelalawan yang berbatasan dengan Taman Nasional Tesso Nilo, yakni di daerah Ukui dengan jalan sepanjang 28 KM yang menghubungkan daerah hutan tanaman Akasia ke pusat pengolahan kayu RAPP di Pangkalan Kerinci. Sementara koridor yang lainnya diketahui sepanjang sekitar 50 KM yang juga menghubungkan daerah hutan tanaman perusahaan di daerah Baserah, Kabupaten Indragiri Hulu ke Pangkalan Kerinci. Dua koridor inilah yang disinyalir menjadi akses masuknya perambah liar. Tidak hanya masalah perambahan hutan, tetapi satwanya juga diburu oleh orang-orang yang mencari keuntungan. Pada 2023 lalu, salah satu gajah yang menjadi garda terdepan dalam Taman Nasional Tesso Nilo ditemukan mati diracun oleh pemburu liar dan gading kiri tersebut telah dicuri oleh pemburu liar tersebut. Selain itu, ada banyak ranjau yang ditanam di dalam lumpur, sehingga beberapa anak gajah mati akibat terjebak ranjau.

Permasalahan utama di Taman Nasional Tesso Nilo yaitu perambahan kawasan hutan. Perambahan terjadi karena upaya *illegal* masyarakat akan kebutuhan lahan untuk berkebun kelapa sawit. Perambahan yang terjadi di Taman Nasional Tesso Nilo adalah serangkaian aktivitas tindak pidana kehutanan mulai dari *claim areal*, jual/beli areal, *illegal logging*, pembakaran hutan, penanaman kelapa sawit, dan terakhir adalah pendudukan/pemukiman kawasan, hal ini berlangsung seperti itu secara terus-menerus dan berulang-ulang, dengan tugas dan fungsi Balai Taman Nasional Tesso Nilo di Kabupaten Pelalawan dalam mewujudkan upaya perlindungan hutan pada Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.

Luas Taman Nasional Tesso Nilo yang di kelola pada saat ini 23.550 Ha atau 28.79% dan luas perambahan yang terjadi pada saat ini sekitar 58.243 Ha atau 71.21% dari luas keseluruhan Taman nasional tesso Nilo 81.793 Ha. Hingga saat ini hutan sawit memiliki lahan yang paling luas yaitu 40.470 ha, areal terbuka 18.679 ha, hutan alam 8.730 ha, hutan 7.165 ha, belukar 6.457 ha, dan pemukiman 274 ha. Zona Rehabilitasi Taman Nasional Tesso Nilo merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai areal untuk pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan. Sejak ditunjuk sebagai Taman Nasional pada tahun 2004 sampai sekarang, Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo telah mengalami tekanan perambahan Berdasarkan hasil analisis tutupan lahan ekosistem hutan alam hanya tersisa  $\pm 14.647$  ha dari  $\pm 81.793$  ha luas Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo Zona Rehabilitasi dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo menempati proporsi luas paling besar dengan luas 56.056 ha (68,49%).

Taman Nasional Tesso Nilo merupakan salah satu kawasan yang kaya akan keanekaragaman hayati, termasuk habitat gajah dan harimau Sumatra yang terancam punah. Yang mana pada tahun 2019 hutan Taman Nasional Tesso Nilo luasnya 14.645 (Ha) sedangkan pada tahun 2023 luas hutannya hanya tinggal 8.730 (Ha) dari data ini tekanan terhadap ekosistem hutan ini semakin meningkat akibat berbagai aktivitas manusia seperti, perambahan hutan, penebangan liar, dan kebakaran hutan. Dan ribuan hektar hutan di Tesso Nilo telah mengalami

degradasi hutan atau rusak yang mana merupakan aktivitas ilegal. Dan upaya konservasi dari Balai Taman Nasional Tesso Nilo, LSM, dan masyarakat lokal terus berjalan.

Komunikasi yang dilakukan dengan beberapa lembaga terkait yaitu, Babinsa, Bhabinkamtibmas, TNI-polri, Koramil-polres, Bpkh Pekanbaru, Yayasan Nasional Tesso Nilo, dan anggaran yang di keluarkan sebanyak 9 miliar. Selain itu, keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sumber daya hutan di Taman Nasional Tesso Nilo menjadi penyebab banyaknya terjadi pembalakan liar. Masyarakat hanya melihat kayu sebagai komoditas utama yang mempunyai prospek dan memiliki nilai ekonomis tinggi untuk dimanfaatkan tanpa mencoba untuk lebih memberdayakan hasil hutan lain selain kayu sebagai komoditas utamanya.

Perjanjian yang di lakukan Taman Nasional Tesso Nilo melibatkan berbagai pihak yaitu, pemerintah daerah, Lembaga *non*-pemerintah, dan Masyarakat lokal, salah satu contohnya yaitu perjanjian antara Taman Nasional Tesso Nilo dengan perusahaan swasta untuk pengelolaan dan pelestarian hutan serta program-program perlindungan satwa, selain itu Taman Nasional Tesso Nilo juga berkolaborasi dengan organisasi lingkungan hidup untuk melaksanakan berbagai inisiatif konservasi dan penelitian.

Fenomena-fenomena dan temuan awal yang telah dipaparkan, dapat dilihat bahwa masih ada masalah dalam proses pengimplementasian kebijakan perlindungan hutan pada hutan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo di Kabupaten Pelalawan. Sehingga peneliti tertarik untuk melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut, melalui penelitian dengan judul "*Implementasi Kebijakan Perlindungan Hutan pada Hutan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo*". Alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini ialah karena Kebijakan Perlindungan Hutan di Taman Nasional Tesso Nilo merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka menjaga, mempertahankan, dan melestarikan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu memaparkan permasalahan penelitian berdasarkan fakta yang terdapat di lapangan. Sesuai dengan judul dan perumusan masalah, maka lokasi penelitian ini di laksanakan di Balai Taman Nasional Tesso Nilo Jalan Koridor RAPP (Langgam) km.4, Pangkalan Kerinci Barat, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Informan dalam penelitian ini di sesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Pengendalian Ekosistem Hutan Ahli Muda TNTN, Polisi Hutan Taman Nasional Tesso Nilo, Penyuluh Kehutanan Terampil, dan Masyarakat. Sumber data yang diperoleh dari data primer ini secara langsung dari sumber data melalui observasi ataupun wawancara dengan pelaku atau orang yang memiliki kunci informasi dan terkait langsung dengan Kinerja Balai Taman Nasional Tesso Nilo dalam menanggulangi masalah perambahan hutan. Data sekunder dapat diperoleh dari kepustakaan seperti berupa buku, majalah, jurnal, dokumen, dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk teknik analisis datanya yaitu pengumpulan data, raduksi data, dan penyajian data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan Perlindungan Hutan Pada Hutan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo**

Komunikasi Perlindungan Hutan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo yaitu proses Perlindungan Hutan pada Taman Nasional Tesso Nilo, sehingga salah satu cara agar program itu terkomunikasikan dengan baik maka harus dilakukan koordinasi dan penyuluhan terkait perlindungan hutan kepada kelompok sasaran yaitu masyarakat. Maksud dan tujuan Perlindungan Hutan ini harus disosialisasikan secara efektif dan efisien agar tidak terjadinya perambahan yang semakin luas. Berkaitan dengan komunikasi peneliti sudah melakukan wawancara sebagai berikut:

*"Koordinasi yang dilakukan antara pegawai Balai Taman Nasional Tesso Nilo dalam mengkomunikasikan kebijakan tentang perlindungan hutan Taman Nasional Tesso Nilo masih ada kendala, karena masih banyak masyarakat yang kurang dalam berpartisipasi untuk perlindungan*

*hutan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo." (Wawancara dengan Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Bapak Heru Sutmantoro, S. Hut., M.M. pada tanggal 30 Oktober 2024).*

Berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan sangat tergantung pada kesanggupan dalam mendayagunakan sumber daya yang ada. Sumber daya manusia ialah aset organisasi yang paling penting, oleh sebab itu fungsi dan perannya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Dari seluruh tahapan-tahapan implementasi, memerlukan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan tugas yang di berikan. Balai Taman Nasional Tesso Nilo adalah implementor dari Taman Nasional Tesso Nilo. Berikut hasil wawancara dengan narasumber terkait SDM yang ada :

*" Sumber daya manusia yang ada di Balai Taman Nasional Tesso Nilo belum mencukupi karena hanya ada 39 pegawai di sub bagian tata usaha, 27 pegawai di seksi wilayah I, dan 19 pegawai di seksi II. Sebenarnya yang paling dibutuhkan sekarang ini ialah terkait penambahan jumlah polisi hutan, dari luas hutan yang lebih dari 81000 ha dengan 24 polisi hutan yang ada kami kewalahan untuk melakukan patroli, dimana sekarang satu orang polisi hutan memegang kendali sekitar 3500 ha." (Wawancara dengan Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Bapak Heru Sutmantoro, S. Hut., M.M. pada tanggal 30 Oktober 2024).*

Apabila implementor mempunyai sikap yang baik, maka implementor bisa mengimplementasikan kebijakan perlindungan hutan dengan baik pula seperti apa yang menjadi tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu implementor yang baik harus memiliki karakter yaitu kejujuran dan komitmen. Perlindungan hutan dengan tingkat pengabdian dan kejujuran yang tinggi akan selalu berhasil melewati tantangan perlindungan hutan. Agar dapat mengetahui terkait indikator Disposisi peneliti sudah melakukan wawancara sebagai berikut :

*"Implementor setuju akan adanya kebijakan perlindungan hutan tersebut, di karenakan implementor melakukan kegiatan yang ada di kebijakan tersebut seperti, melakukan pencegahan kebakaran hutan, pembasmi hama atau penyakit, dan pembinaan kepada satwa, namun masih banyak masyarakat yang menolak akan kebijakan tersebut karena menurut mereka itu merugikan." (Wawancara dengan Pengendalian Ekosistem Hutan Taman Nasional Tesso Nilo, Bapak Dodi Firmansyah, S.Hut pada tanggal 30 Oktober 2024).*

Mengetahui tentang struktur birokrasi dari Implementasi Kebijakan Perlindungan Hutan pada Hutan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo, penulis melakukan wawancara langsung dengan Balai Taman Nasional Tesso Nilo. Untuk mengetahui bagaimana hal yang terkait indikator struktur birokrasi, peneliti melakukan wawancara dengan informan-informan, yang menyatakan bahwa :

*" Pedoman kami dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan ini ialah berdasarkan SOP yang telah disediakan dimana di dalam SOP tersebut sudah diatur terkait kebijakan ini, karena setiap bidang memiliki SOP nya tersendiri " (Wawancara dengan Pengendalian Ekosistem Hutan Taman Nasional Tesso Nilo, Bapak Dodi Firmansyah, S.Hut pada tanggal 30 Oktober 2024).*

### **Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Perlindungan Hutan Pada Hutan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo**

Anggaran dana dari pemerintah pusat untuk perlindungan Taman Nasional Tesso Nilo kawasan konservasi sering kali tidak mencukupi kebutuhan operasional, seperti patroli hutan, rehabilitasi habitat, dan pemantauan populasi satwa liar. Kegiatan patroli pencegahan di tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2021 dan 2022. Adapun upaya penegakkan hukum mengalami kesulitan dalam menangkap para pelaku pembakaran karena metode pembakarannya ditinggal sehingga pelaku lebih dahulu bisa melarikan diri.

*"Anggaran yang di berikan APBN tidak mencukupi untuk melakukan kegiatan, seperti patroli rutin yang di lakukan polisi hutan Taman Nasional Tesso Nilo, dan juga banyaknya penambahan pegawai di Taman Nasional Tesso Nilo membuat Balai Taman Nasional Tesso Nilo melakukan revisi" (Wawancara dengan Bendahara Pengeluaran Taman Nasional Tesso Nilo, Ibu Riche Rotari, S.Hut pada 30 Oktober 2024).*

Ketidakmemadai sarana prasarana sering kali menjadi faktor penghambat kelancaran kegiatan dan berpotensi menurunkan produktivitas atau kualitas hasil yang diharapkan.

Keterbatasan fasilitas membuat upaya perlindungan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo menjadi sulit di lakukan, ini mengakibatkan terkendalanya polisi hutan Taman Nasional tesso Nilo melakukan patroli rutin.

*“Kendala yang kami alami dalam penanggulangan kebakaran hutan adalah kurangnya peralatan mulai dari selang, mesin portabel, dan mobil tangki, akses pemadaman tidak bisa di tempuh jalur darat. Selain itu, kurangnya kendaraan operasional seperti motor atau mobil patroli untuk memantau wilayah yang luas dan rawan konflik dengan perambahan” (Wawancara dengan Polisi Hutan Taman Nasional Tesso Nilo , Bapak Rifai S.Hut pada 28 November 2024).*

Kurangnya komunikasi sering kali menyebabkan kesalahpahaman, konflik, atau ketidaksepahaman, baik dalam hubungan pribadi, lingkungan kerja, maupun komunitas. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi terbuka, jelas, dan saling menghormati. Untuk lebih jelasnya, penulis bertanya perihal ini kepada informan sebagai berikut :

*“ Sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai Balai taman Nasional Tesso Nilo (penyuluh) tidak secara merata dan menurut bapak belum menyentuh seluruh elemen, karena masih banyaknya pendatang baru yang ada di Desa Lubuk Kembang Bunga sehingga menyebabkan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan konservasi.” (Wawancara dengan masyarakat Desa Lubuk kembang Bunga, Bapak Indra pada 28 November 2024).*

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan Implementasi Kebijakan Perlindungan Hutan pada Hutan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo belum berjalan dengan maksimal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Perlindungan Hutan Pada Hutan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo, yang pertama, anggaran yang kurang memadai, yang kedua, Sarana dan prasarana yang terbatas, dan yang ketiga, minimnya penyampain informasi atau komunikasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2016). *Kebijakan Publik*. salemba humanika.
- Aryana, I. W. P. S. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hutan. *Yustitia*, 15(2), 37–44. <http://www.jstor.org/stable/10.2307/j.ctv11vc7kd.30>
- Austin, T., & Marleni, M. (2021). Implementasi Program Kampung Iklim: Urban Farming Melalui Hidroponik Dan Budikdamber Di Kelurahan Sialang Palembang. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 1(3), 96–104. <https://doi.org/10.53769/jai.v1i3.128>
- Buana, S. (2022). Kebijakan Pemerintah dalam Menjaga Kelestarian Hutan Lindung Taman Nasional Kerinci Seblat di Kabupaten Musi Rawas Utara. *Jambi*, 2009, 1–9.
- Darlisma, & Hafidz, R. Al. (2022). Law Enforcement on Forest Area Protection By Forest Police in Pasaman Regency. *Journal Review of Justisia*, 4(2), 1–14.
- Dewa, M. J., Sensus, L., Sinapoy, M. S., Haris, O. K., Tatawu, G., & Saputra, I. A. (2023). *Perlindungan Hutan dalam Rangka Pembangunan Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan Forest Protection in the Framework of Environmentally Sustainable Development*. 5(3), 809–822.
- Erwan Agus Purwanto, D. rati sulistyastuti. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gava media.
- Firdaus, A., Waris, I., & Natsir, N. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DI KECAMATAN PALU SELATAN KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(4), 24–35. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jirs/article/view/861/742>
- Hayat. (2018). *Kebijakan Publik : Evaluasi, Reformasi, Formulasi*. Intrans Publishing.
- Hutapea, S., Besti, ), & Simbolon, R. (2021). Strategi Komunikasi Pemasaran Dalam Menarik Minat Pemasang iklan Radio Kiss Fm Medan Pada Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 6(2), 128–137.
- Jufri, S. (2021). *Efektivitas pengawasan balai konservasi sumber daya alam kota palopo dalam perlindungan hutan konservasi perspektif fiqih lingkungan*.

- Kencana. (2011). *Public policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Prenada Media group.
- Khana Wijaya, Rishi Suprianto, & Endi Istiawan. (2020). Implementasi Framework Bootstrap Dalam Perancangan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Quran Al-Ittifaqiah (Stitqi) Indralaya berbasis Web. *JSK (Jurnal Sistem Informasi Dan Komputerisasi Akuntansi)*, 4(2), 7–11. <https://doi.org/10.56291/jsk.v4i2.49>
- Kurniawan, W., & Maani, K. D. (2020). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(4), 67–78. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i4.95>
- Lisa Nurhikmah. (2023). Implementasi Teori Behaviorisme Dalam Pembelajaran Akidah Akhlak Di MIS Al Hunafa Palangka Raya. *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 20(3), 759–766. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/5107>
- Lutfi, Andi Ahmad Afandy, and A. A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Hutan Oleh Polisi Kehutanan. *JULIA : Jurnal Litigasi Amsir*, 10(4), 576–582. <https://lib.unnes.ac.id/519/>
- Mayarni, Almasdi, S., Sofyan, H. S., Amrul, K., Mimin, S. N., Andri, S., & Eka, H. (2022). Tata Kelola Kawasan Mangrove Terintegrasi Dalam Perspektif Governance Di Indonesia. In *Universitas Riau* (Issue January).
- Nainggolan, E. M., Mardiana, S., & Adam, A. (2023). Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Tentang Program Bela Pengadaan. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 10(1), 1–16. <https://doi.org/10.37606/publik.v10i1.476>
- Nasution, M. S., Tua, H., & Zulkamaini, Z. (2024). Implementation of social forestry policy–Can it reduce economic inequality in sustainable management of forest areas?. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 506, p. 05005). EDP Sciences.
- Nugroho, R. (2008). *Public policy : Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik Kebijakan Sebagai The Vivth Estate-Metode Penelitian Kebijakan*. PT.Elex Media Komputindo, Kelompok Grammedia.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy : Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik, Kimia Kebijakan Publik*. PT.Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia.
- Nuridin, I. A. (2022). *Implementasi Kebijakan Pemerintahan daerah dalam Pelestarian Hutan di Kecamatan Lembang (studi kasus Alih fungsi hutan di Kecamatan Lembang )*.
- Pristiandaru, Danur Lambang. 2023. Daftar Lengkap 54 Taman Nasional di Indonesia. Kompas. Diakses pada Juni 2024. <https://lestari.kompas.com/read/2023/05/17/150000886/daftar-lengkap-54-taman-nasional-di-indonesia>
- Putri, Z. A. (2023). *Analisis Implementasi Kebijakan Restorasi gambut di Taman Hutan Raya orang kayo Hitam Provinsi Jambi*. 1–23.
- Putu Ayu Irma Wirmayanti, Ida Ayu Putu Widiati, & I Wayan Arthanaya. (2021). Akibat Hukum Penebangan Hutan secara Liar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 197–201. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3067.197-201>
- Rahmawati, A., Ansari, M. I., & Parawangi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(1), 219–231. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3681>
- Rangkuti Syahnan. 2019. Taman Nasional Tesso Nilo Kembali Terbakar, Kompas. Diakses pada Oktober 2024. <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/08/12/tntn-kembali-terbakar>
- Rusdianta, Rudisubiyakto, B. P. (2022). *Kebijakan Publik ; Aktor, Model dan Proses*. CV. Graha Ilmu.
- Saputra, R. D. (2021). Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Di Proyek Konstruksi PT. Imaji Cipta Tridhistana Tahun 2021. *Tesis*, 1–95.
- Siburian, A. N., & Anggrainie, N. (2022). Pengaruh Hedonic Shopping Motivation, Brand Image,

- Brand Ambassador, Diskon, Harga dan Sales Promotion terhadap Pembelian Implusif Pada e-Commerce Tiktok Shop Dimasa Pandemi Covid-19. *Jurnal Mirai Management*, 7(3), 176–191. <https://doi.org/10.37531/mirai.v7i3.2492>
- Siregar, N. (2022). Menentukan Model Implementasi Kebijakan dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA). *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(7), 713–722. <https://bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/3320/2430>
- Siregar Raja Adil. 2023. Hutan Taman Nasional Tesso Nilo Terbakar Tim Sempat kesulitan. Detiksumut. Diakses pada Oktober 2024. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6788109/hutan-taman-nasional-tesso-nilo-terbakar-tim-sempat-kesulitan>
- Sujianto. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep, Konsep, Teori, dan Praktik*. Alaf Riau.
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36. <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>
- Sugiyono (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk penelitian yang bersifat : eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*
- Syukur M. 2022. Kondisi Memprihatinkan Hutan di Taman Nasional Tesso Nilo Tergerus Ladang Sawit, Liputan6. Diakses, pada Oktober 2024. <https://www.liputan6.com/regional/read/4867991/kondisi-memprihatinkan-hutan-di-taman-nasional-tesso-nilo-tergerus-ladang-sawit>
- Titop, H., Suharliyan, S., & Zahra, N. (2023). Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terhadap Nasabah Pada Bank Sultra. *Sultra Journal of Economic and Business*, 4(2), 138–144. <https://doi.org/10.54297/sjeb.v4i2.516>
- Wanda, S. E. (2021). Pelaksana Penanggulangan illegal logging Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan (Studi kasus Balai Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan ). *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Wibawa, S. (1994). *Kebijakan Publik ; Proses dan Analisis*. Intermedia.
- Zulkarnain, U. (2017). Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik Di Daerah, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Makassar. *Jurnal Analisis dan Kebijakan Publik Volume 3 Number 1 Juni 2017*.
- Zulkarnaini, Z., & Mashur, D. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan.
- Zulkarnain, U. (2017). Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik Di Daerah, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Makassar. *Jurnal Analisis dan Kebijakan Publik Volume 3 Number 1 Juni 2017*.
- Zulkarnaini, Z., & Mashur, D. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan.